

IMPLEMENTASI PELAYANAN *INAPORTNET* DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN

Farras Anugerah Suryandi¹, Nurisa Nazira Putri², Vivin Titin Rahmayanti³, Ardi Putra⁴

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: 190565201026@student.umrah.ac.id, 190565201005@student.umrah.ac.id, 190565201117@student.umrah.ac.id, ardiputra@umrah.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang implementasi layanan *inaportnet* yang diterapkan pada otoritas pelabuhan dan kantor pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun. Jurnal ini menjelaskan tentang pengguna *inaportnet* yang masih memiliki masalah antara agen pelayaran dengan pihak penyelenggara, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data dan wawancara, pengumpulan data menggunakan reduksi data, dan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian ini, kehadiran *inaportnet* dapat menjadi solusi yang mudah digunakan antara agen pelayaran dengan pihak penyelenggara. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di kantor pelabuhan dan otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Balai Karimun.

Kata Kunci: Implementasi; *Inaportnet*; Pelayanan

ABSTRACT

This journal discusses the implementation of the inaportnet service that is applied to the port authority and port office of Class I Tanjung Balai Karimun. This journal explains about inaportnet users who still have problems between shipping agents and the organizers, this study uses qualitative research using data collection and interviews, data collection using data reduction, and primary data sources and secondary data sources. From the results of this study, the presence of inaportnet can be an easy-to-use solution between shipping agents and the organizers. In order to improve services at the harbor office and port authority class I Tanjung Balai Karimun.

Keywords: implementation, inaportnet and service

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau, dari Sabang hingga Merauke terbentang dan saling terhubung, alat penghubung antar pulau yaitu seperti transportasi udara, transportasi darat dan juga laut, tentu hal ini harus dimaksimalkan terutama transportasi laut mengingat sebagian besar wilayah Indonesia didominasi oleh laut, dan perairan penting dan sangat strategis untuk arus perdagangan internasional. Berdasarkan pada kebijakan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Pelayanan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perairan Indonesia dan salah satu lembaga nya yaitu kesyahbandaran dan otoritas kepelabuhanan yang bertugas mengawasi jalur pelayaran kapal dan mengatur lalu lintas laut lembaga ini dinaungi oleh kementerian perhubungan sebagai perpanjangan tangan tugas kementerian perhubungan, dan menjalankan fungsi lapangan dalam menciptakan kualitas transportasi perhubungan yang baik.

Dalam pelaksanaannya KSOP memiliki wadah atau produk yang berfungsi sebagai

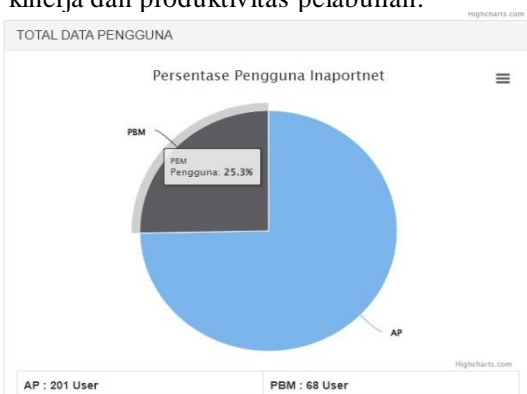
monitoring pergerakan kapal dan bongkar muat barang antar daerah baik secara nasional maupun internasional, yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) elektronik yang dibentuk berdasarkan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah yang dikenal dengan nama *Indonesia National Single Window* (INSW) dan salah satu bagian dari implementasi program INSW adalah *inaportnet* (Tria Mardalena, 1981).

Sistem pelayanan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kapal dan barang di pelabuhan. Tujuan dibentuknya sistem ini adalah pengoptimalan sistem elektronik dalam pelayanan pengurusan dokumen kepelabuhanan dan dokumen kapal. Berdasarkan hasil Deklarasi Asian Concord II di Bali pada tahun 2003, pemerintah Indonesia bertekad untuk menciptakan dan menerapkan sistem pelayanan dokumen ekspor dan impor di pelabuhan melalui satu pintu tanpa tatap muka maka dibentuklah *Indonesia National Single Window* (INSW). Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yaitu, sebuah penyelenggaraan publik untuk angkutan barang dilaut merupakan pelaksanaan pelayanan angkutan barang kedaerah tertinggal, terpencil, terluar, dan

perbatasan sesuai yang telah ditetapkan yaitu harus memperhatikan dan harus menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran.

Kewajiban pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban suatu pelayanan publik untuk angkutan barang dilaut yang besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. Surat yang dibuat oleh pemilik barang atau perusahaan jasa pegurusan transportasi yang ditujukan kepada pihak pengangkut atau kapal untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat. Dimana portnet sistem menjadi salah satu pilar utama yang berfungsi untuk mempercepat arus barang di pelabuhan dan aplikasi ini merupakan sistem elektronik untuk menyelesaikan prosedur ekspor impor secara terpadu, cepat, efisien dan berkelanjutan. Inaportnet merupakan suatu wadah (portal) yang dioperasikan dan diintegrasikan ke seluruh pola kegiatan berbasis *digital e-document*.

Hal ini juga mencakup pelayanan dan perizinan dari seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Sementara itu pelayanan pelabuhan yang optimal perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga meminimalisir faktor penghambat proses pengiriman barang dan jasa. Maka dari itu merespon permasalahan dan kendala yang terjadi, penulis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap sistem pelayanan inaportnet yang terpadu dalam INSW guna mencapai efisiensi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan barang dan kapal di pelabuhan serta mendukung upaya peningkatan kinerja dan produktivitas pelabuhan.



Gambar 1. Presentase pengguna Inaportnet di pelabuhan tanjung balai karimun

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Tanjung Balai Karimun merupakan

suatu instansi yang berada dibawah pemerintahan yang berafiliasi langsung dengan kementerian perhubungan. KSOP Tanjung Balai Karimun yang semula adalah Kelas II saat ini telah meningkat menjadi Kelas I, hal ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab KSOP semakin bertambah. Tidak dapat dipungkiri ada kaitannya dengan jumlah penumpang yang naik/turun di pelabuhan Internasional/Domestik Tanjung Balai Karimun itu sendiri. Sehubungan dengan semakin bertambahnya tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sudah seharusnya dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran dari kegiatan operasional yang ada saat ini. Disamping itu masih banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, misalnya Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitasnya di bidang masing-masing. Untuk KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun saat ini sudah menerapkan sistem inaportnet yang merupakan satu dari 23 pelabuhan terpilih di Indonesia sebagai usaha pengembangan pembangunan di sektor transportasi laut. Penerapan inaportnet ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kapal dan muatan di pelabuhan agar berjalan cepat, valid, transparan dan terstandar, selain itu biaya yang dikeluarkan pun akan optimal, sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia (**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN**, n.d.).

Menurut malisan dan trisnawati dalam (Andromeda & Putra, 2020) Penggunaan sistem Inaportnet dinilai belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala teknis. Pada saat ini, proses penyelesaian clearance kapal telah mengalami perubahan, dari yang awalnya menggunakan sistem manual menjadi sistem online dengan sistem Inaportnet. Pengguna sistem Inaportnet adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan, seperti shipping lines/agent, freight forwarder, container Freight Station (CFS), Custom brokerage (PPJK), importir dan eksportir, depo container, warehouse, dan inland transportation.

STUDI KEPUSTAKAAN

Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksana yang berdiri sendiri dalam konteks ilmiah (Pramono, 2020). Menurut Edwards dan Sharkansky kebijakan publik memiliki bentuk peraturan perundang-undangan, pidato-pidato

pejabat pemerintah (Tachjan, 2006).

Pelayanan publik menurut subarsono dikutip oleh dwiyanto merupakan suatu produk dari birokrasi publik yang selalu diterima oleh warga masyarakat sebagai unsur pengguna oleh masyarakat luas (Sri, 2014).

Inaportnet adalah pemanfaatan teknologi kedalam ragam Pelabuhan guna untuk memudahkan layanan kemaritiman di Indonesia (Mardona & Atma, n.d.).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010). Adapun Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi (Johnson, 1975) bentuk dari observasi bisa dimulai dari hal yang sederhana dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek responden (Rianto, n.d.), dengan mendapatkan sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya pengguna layanan inaportnet mulai dari agen pelayaran (AP), hingga pelayanan bongkar muat, menunjukkan bahwa inaportnet sebagai system informasi pelayanan satu pintu yang berada di KSOP Tanjung Balai Karimun sudah berjalan cukup optimal, namun tentu sebagai kantor yang tingkatannya merupakan tingkat I tentu amanah yang diemban cukup banyak dan harus dimaksimalkan guna terwujudnya pelayanan satu pintu yang mumpuni dan mewujudkan *Indonesia National Single Window (INSW)* yang modern dan berkelanjutan, adapun dalam pelaksanaannya inaportnet merupakan perwujudan modernisasi system pelayanan yang terpadu guna mengefisiensi dan mempercepat waktu pelayanan sehingga mempermudah petugas tidak perlu untuk turun langsung ke lapangan.

Menurut Ahmad dan Mashuri dalam (Maulita & Rahmat, 2022) Inaportnet merupakan suatu wadah (portal) yang dioperasikan dan diintegrasikan ke seluruh pola kegiatan berbasis digital e-document. Hal ini juga mencakup pelayanan dan perizinan dari seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Selain itu, pelayanan pelabuhan yang optimal perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga hal penting yang perlu diusahakan adalah menghindari

waktu tunggu kapal (*waiting time*) yang lama serta utilitas sistem antrian yang rendah.

Implementasi Inaportnet dapat mempermudah dalam proses pelayanan bagi pengguna jasa pelayaran. Dalam implementasi terjadi beberapa kendala yang dominan disebabkan oleh jaringan kemampuan pengguna inaportnet. Sehingga diperlukan kesiapan sistem jaringan internet yang mumpuni untuk proses implementasi Inaportnet serta peningkatan kemampuan pengguna inaportnet melalui pelatihan dan sosialisasi (Maulita & Rahmat, 2022).

Implementasi sistem keamanan informasi Inaportnet di lapangan sudah berjalan dengan baik namun belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan salah satu aspek pendukung sistem keamanan informasi yang juga penting yaitu kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi (*awareness*) dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan temuan dilapangan yaitu tidak adanya jadwal rutin untuk kegiatan penetration test dan patch. Jadwal secara rutin untuk penetration test dan patch selain untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam sistem pengamanan informasi di Inaportnet juga untuk meminimalisir ancaman cyber yang dapat berevolusi setiap waktu (Mufidasari et al., 2019).

Dengan adanya inaportnet permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal, dan pemanduan untuk bongkar muat barang bisa dilakukan dimana saja secara cepat, mudah dan transparan dengan adanya ini mempermudah pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan inaportnet merupakan system yang terintegritasi untuk melayani lalu lintas dan angkutan laut secara maksimal. Layanan inaportnet dikembangkan secara bertahap baik dari jangkauan maupun jenis layanannya. Pada tahun 2013, layanan dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan layanan meliputi layanan izin kapal, layanan pengeluaran dan penerimaan container, layanan manifest domestik dan pembayaran secara elektronik. Inaportnet adalah sistem pelayanan tunggal yang berbasis web/ internet yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam sistem pelayanan barang dan kapal untuk seluruh instansi terkait (stakeholder) Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 tahun 2015 tentang Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) On line di pelabuhan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 192 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM. 157 tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus barang di pelabuhan, memangkas waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, menurunkan biaya logistic dan sebagai langkah transparansi pelayanan di pelabuhan. Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widyaningrum & Widiarti, n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan adanya inaportnet permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal, dan pemanduan untuk bongkar muat barang bisa dilakukan dimana saja secara cepat, mudah dan transparan dengan adanya ini mempermudah pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan inaportnet merupakan system yang terintegrasi untuk melayani lalu lintas dan angkutan laut secara maksimal.

Dengan adanya inaportnet permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal, dan pemanduan untuk bongkar muat barang bisa dilakukan dimana saja secara cepat, mudah dan transparan dengan adanya ini mempermudah pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan inaportnet merupakan system yang terintegrasi untuk melayani lalu lintas dan angkutan laut secara maksimal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan dan pengaplikasian system pelayanan dipelabuhan tanjung balai karimun sudah cukup baik, namun perlu adanya pengoptimalan system yang terintegrasi sehingga menjadikan pelabuhan tanjung balai karimun berbasis online. Dan juga harus ada evaluasi dalam penggunaan system inaportnet guna untuk meminimalisir terjadinya error service dalam penerapan system inaportnet dan inaportnet sebagai wadah online dalam pelayanan di kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan kapal sehingga menjadi teratur dan efisien dalam pelayanannya.

Saran

Adapun saran dari penulis untuk KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dan pengguna *INAPORTNET* / perusahaan atau Agen Pelayaran, sebagai berikut:

Saran pengguna inaportnet

Sistem inaportnet sangat mempermudah dan memberikan layanan kepada pengguna jasa. Selain itu juga sistem inaportnet ini juga dapat mengefisienkan waktu bagi pengguna untuk menyelesaikan serta memperlancar Estimated Time of Departure (ETD) kapal, sehingga kapal terhindar dari delay yang dapat merugikan sebuah kapal. Secara umum inaportnet sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu diupayakan agar terintegrasi dengan inaportnet untuk satu kesatuan dengan sistem dalam INSW agar menghilangkan perbedaan data dan menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Sebuah perbedaan menimbulkan ketidaksetaraan layanan kualitas dan kecepatan di masing-masing instansi terkait yang terjadi akibat lambatnya proses layanan serta resiko transaksi yang diproses. Dengan demikian, semua ekspor-impor atau semua jenis transaksi akan berlaku standar dan proses pembuatan keputusan yang mestinya setara. Oleh karena itulah perlunya peningkatan kesetaraan kualitas dan kecepatan layanan inaportnet meskipun ada terdapat perbedaan penerapan prosedur layanan dan percepatan pembuatan keputusan. Penerapannya juga tidak mudah, banyak batasan yang harus diatasi agar resiko di semua instansi dapat diatasi.

Saran pemerintah untuk KSOP

Pemerintah yang berada di dalam pelabuhan selaku pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk melakukan pelayaran dan dianggap laik laut, maka pemerintah harus tegas dan siaga dalam melakukan sebuah pengawasan yang dimana lebih teliti dalam memberikan perizinan. Nahkoda kapal pun harus profesional serta proporsional dalam melakukan pengoperasian kapal dan memahami tentang aturan yang telah berlaku. Sehingga dengan dibentuknya peraturan mengenai sanksi terhadap syahbandar apabila lalai dalam melakukan sebuah tugas, wewenang serta fungsi yang ada dipelabuhan karena syahbandar merupakan organ inti yang ada dipelabuhan. Selanjutnya perusahaan pengangkutan harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi nasional maupun ratifikasi oleh Indonesia dan juga memberikan fasilitas dengan teknologi untuk mencegah faktor-faktor yang dapat membahayakan kapal. Kemudian harus ada pergabungan antara pengguna jasa yaitu masyarakat, perusahaan pengangkutan dan juga pemerintah yang berperan penting.

REFERENSI

Andromeda, Vega F., & Putra, I Made Wahyu S. (2020). Penyelesaian Clearance Dengan Sistem Inaportnet Guna Memperlancar

- Estimated Time Departured. *Jurnal Transpostasi*, 20, 115–124.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Johnson, J. (1975). *Doing Field Research*. Free Press.
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN. (n.d.). <http://dephub.go.id/org/ksoptanjungbalaikarimun/sejarah>
- Mardona, & Atma, yeyen dwi. (n.d.). Analisis Penerapan Framework Cobit 5.0 Untuk Analisis Desain Sistem Monitoring Pelacakan Kapal Keluar Masuk Inaportnet (Pelabuhan Karingau Balikpapan). *2021*, 5, 49–54. <https://doi.org/10.47002>
- Maulita, & Rahmat. (2022). Tinjauan Implementasi Sistem INAPORTNET (Sebuah Studi Literature). *Jurnal Maritim*, 12.
- Mufidasari, A., Octavian, A., & Saragih, herlina juni risma. (2019). Implementasi Sistem Pengamanan Informasi Dalam Aplikasi Inaportnet Untuk Maritime Cyber Security. *Jurnal Keamanan Maritim*, 5.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *UNISRI Press*. UNISRI Press.
- Rianto. (n.d.). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*.
- Sri, M. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan* (First Edit). CV. Indra Prahasta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (Eds.)). AIPI Bandung.
- Tria Mardalena. (1981). Peranan Teknologi Informasi Terhadap Mekanisme Pelayanan Pelabuhan Penumpang Internasional/Domestik Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Widyaningrum, N., & Widiarti, N. (n.d.). *Studi Deskriptif Penerapan INAPORTNET Dalam Pelayanan Konsumen di Perusahaan Keageanan Kapal*.
<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/11941/tingkatkan-pelayanan-sistem-inaportnet-kemenhub-sosialisasi-dan-evaluasi-implementasi-di-pelabuhan-makassar>
<http://dephub.go.id/post/read/inaportnet,-sistem-informasi-standar-pelayanan-kapal-dan-barang>